

**PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA KENDARI**

KASMIL

**La Ode Mustafa
Muh. Yusuf**

kasmil@gmail.com

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, penulis menggunakan purposive sampling. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis menggunakan wawancara mendalam (In depth interview) dengan informan yang memiliki pengetahuan berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan koordinasi pada kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditinjau dari pelaksanaan koordinasi vertikal oleh Kepala Bappeda kota kendari selaku pimpinan pada Kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik yakni telah melakukan Koordinasi dengan Walikota Kota Kendari tentang pelaksanaan program kerja maupun program pembangunan kepada para pegawainya begitupun dengan koordinasi horizontal yang dilakukan para pegawai dalam mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan tugas pada unit-unit kerja pada Kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik, yakni adanya pengarahan, penyelarasan dan mengintegrasikan program-program pembangunan antara SKPD Pemerintah Kota Kendari, Camat dengan Para Lurah, dan Tokoh Masyarakat kota kendari tentang pelaksanaan berbagai program kerja pada kota kendari. (2) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda kota kendari juga telah terlaksana dengan baik. Hal ini jika ditelisik dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pasar, sekolah, puskesmas dan peningkatan pembangunan dari sector lingkungan maupun pembangunan non fisik berupa peningkatan moral, akhlak dan disiplin masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan pembinaan mental spiritual masyarakat telah terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Pelaksanaan fungsi koordinasi, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam bentuk operasional penyelenggaraan pembangunan selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut Bintaro (1974).

Boseman(1989) Agar proses pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari pada aparat pelaksana pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan usaha dari setiap penanggung jawab pelaksanaan pembangunan yang ada disuatu daerah guna menggalakkan proses pembangunan terutama pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota kendari?
2. Bagaimana Keberhasilan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota kendari?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota kendari
2. Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota kendari

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari mengenai pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Fungsi Koordinasi

Dalam berbagai literatur dapat dijumpai berbagai arti koordinasi dimana disebutkan bahwa koordinasi bersumber pada bahasa latin *coordination* berarti “ kombinasi atau interaksi yang harmonis”. Interaksi yang harmonis diantara para pegawai suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik maupun secara horizontal diantara para pegawai secara timbal balik pula. Demikian pula interaksi antara pimpinan organisasi, apakah ini manajer tingkat tinggi(*top manager*) atau manajer tingkat menengah (*middle manager*) dengan masyarakat luar organisasi (Effendi, 1992:116).

B. Konsep Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan yang berencana, dimana adanya suatu kenyataan fisik dan keadaan jiwa yang diupayakan oleh masyarakat sebagai subjek dari pembangunan yang dilaksanakan melalui suatu kombinasi sebagai suatu proses sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik. Pembangunan bukan saja sebagai perubahan dalam bentuk fisik semata juga meniti beratkan pada perubahan spiritual sehingga diharapkan terjadi keselarasan atau keseimbangan. Sedangkan Siagian (2006:67) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha perubahan dari keadaan dari kondisi masyarakat tertentu, kepada suatu keadaan dan kondisi masyarakat yang dianggap lebih baik.

C. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan tindakan yang akan dilaksanakan pada masa datang yang tujuannya untuk mencapai apa yang diinginkan. Perencanaan menurut Wilson Soewarno (1989) adalah suatu proses yang mengubah proses lain atau mengubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang ditetapkan oleh perencanaan atau orang/badan yang diwakili perencanaan itu (Johariah, 1992), menurut Waterson dalam (Soewarno,1992) mengemukakan tentang pengertian perencanaan merupakan usaha yang secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

D. Kerangka Pikir

Koordinasi adalah kegiatan mengkoordinasikan segenap kegiatan individu dan kelompok sepanjang hirarki kewenangan. Koordinasi mencakup rantai komando tentang pengawasan, delegasi dan masalah sentralisasi dan desentralisasi. Makin berbeda fungsi yang diawasi tentang pengawasan berkurang, makin jauh jarak antara fungsi yang diawasi, makin kurang tentang pengawasan. Makin perlu koordinasi semakin sempit tentang tentang pengawasan dan makin perlu perencanaan makin sempit pula tentang pengawasan.

Menurut Hasibuan (2001:87) bahwa koordinasi yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit,

kesatuan-kesatuan kerja yang ada. Adapun koordinasi dalam penelitian ini akan ditinjau dari koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari. Dengan pertimbangan adanya indikasi tentang kurangnya koordinasi khususnya koordinasi internal dan pelaksanaan pembangunan di kota kendari.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang – orang yang benar benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Penentuan informan penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu di lakukan dengan cara secara sengaja terhadap pihak yang berkompeten yang dianggap mampu memberikan informasi dan pengetahuan dalam penelitian ini. Informan (*Keywords*) yang mencakup 8 orang antara lain:

1. Kepala Bappeda
2. Sekertaris Bappeda
3. Kepala BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia
4. Camat
5. Lurah
6. Pegawai dilingkup Bappeda
7. Tokoh Masyarakat

C. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari responden dan informan penelitian. Sementara data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen kantor yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Baik data primer maupun data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library stady*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen, buku, literatur, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Studilapangan (*field study*) yaitu pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data dilapangan digunakan teknik-teknik sebagaiberikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan memberikan penjelasan terhadap keterkaitannya dengan penelitian.
- b. Wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara terstruktur dengan beberapa informan yang telah ditentukan.
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan bukti gambar dari objek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data, baik terhadap data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dan dengan didukung data kualitatif.

F. Definisi Konsep

1. Koordinasi adalah kegiatan mensinergikan dan mengintegrasikan segenap kegiatan individu dan kelompok sepanjang hirarki kewenangan. Koordinasi mencakup rantai komando tentang pengawasan, delegasi dan masalah sentralisasi dan desentralisasi.
 - a) Koordinasi vertikal yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini mencakup kesatuan tindakan, pemahaman prosedur kerja, penyelesaian konflik, pelaksanaan tugas, peningkatan kerja sama, dan peningkatan produktivitas kerja.
 - b) Koordinasi horizontal yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.
2. Pelaksanaan pembangunan adalah suatu proses melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan secara sistematis dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik yang terdiri dari 2 aspek yaitu:
 - a) Pembangunan fisik
Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan dan setiap kegiatan dari usaha pembangunan harus meningkatkan nilai-nilai suatu objek agar dapat berubah kearah yang lebih baik.
 - b) Pembangunan non fisik
Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia yang terfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dan kedisiplinan tentang kebersihan lingkungan dan pembinaan mental spiritual masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan kota kendari merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki tupoksi dalam merencanakan pembangunan daerah agar lebih tertata dan teratur dengan melalui jalur koordinasi-koordinasi dengan berbagai pihak skpd dan seluruh stake holders. Bappeda kota kendari bertempat di alamat Jl. Drs. H. Abd. Silondae, No. 8 Kendari.

1. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.

1. Struktur Organisasi

Struktur adalah kerangka kerja sama atas dasar pembagian kerja dalam suatu organisasi. Dengan struktur organisasi dapat diperoleh suatu gambaran tentang peranan organisasi, saluran-saluran organisasi dan tanggung jawab, perincian serta jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi yang dimaksud dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya The Liang Gie (2000:64), dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern memberikan pengertian tentang struktur organisasi yaitu “struktur organisasi adalah perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi, serta wewenang tanggung jawab atas setiap fungsi yang berhubungan”.

C. Keadaan Pegawai Bappeda Kota Kendari

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, kedudukan unsur personal selaku sumber daya manusia memegang peranan yang sangat strategis, karena unsur personil (pegawai) adalah merupakan pelaku dan pengelolaan utama segenap rencana dan program kerja organisasi yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

D. Keadaan Sarana Dan Prasarana Bappeda Kota Kendari

Setiap organisasi atau instansi, baik swasta maupun pemerintah membutuhkan berbagai faktor pendukung atau penunjang dalam melaksanakan aktivitas sehariannya guna melancarkan proses pelaksanaan pekerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi

Salah satu faktor penunjang yang sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi/instansi adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai. Prasarana yang dimaksud adalah segala sesuatu, baik fisik yang harus ada maupun non fisik sebagai instrumen yang digunakan secara tidak langsung dalam upaya pencapaian tujuan organisasi seperti: tanah bagi pembangunan gedung kantor, perumahan dan lain-lain. Sedangkan sarana adalah segala alat fisik maupun non fisik yang digunakan secara langsung didalam suatu organisasi

seperti komputer, kendaraan dan berbagai macam peralatan kantor yang terdapat di dalamnya.

E. Pelaksanaan Koordinasi di Kantor Bappeda Kota Kendari

Koordinasi mempunyai arti penting dalam pembangunan, hal ini disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah, dimana apabila program tersebut tidak dapat dikoordinasikan dengan baik maka akibatnya akan terjadi kekaburan dan saling tumpah tindih dalam hal ini dinas dan jawatan yang ada di kota kendari.

F. Pelaksanaan Pembangunan Bappeda Kota Kendari.

Pelaksanaan pembangunan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah mutlak dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dimensi Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda Kota Kendari meliputi:

1. Peningkatan Moral, Akhlak dan Disiplin.
2. Kebersihan dan Kondisi Lingkungan Kota.
3. Pembangunan Infrastruktur, Penataan Tata Ruang.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perekonomian.
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial.
6. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi pada kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditinjau dari pelaksanaan koordinasi vertikal oleh Kepala Bappeda kota kendari selaku pimpinan pada Kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik yakni telah melakukan Koordinasi dengan Walikota Kota Kendari tentang pelaksanaan program kerja maupun program pembangunan kepada para pegawainya begitupun dengan koordinasi horizontal yang dilakukan para pegawai dalam mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan tugas pada unit-unit kerja pada Kantor Bappeda kota kendari telah terlaksana dengan baik, yakni adanya pengarahan, penyesuaian dan mengintegrasikan program-program pembangunan antara SKPD Pemerintah Kota Kendari, Camat dengan Para Lurah, dan Tokoh Masyarakat kota kendari tentang pelaksanaan berbagai program kerja pada kota kendari.
2. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Bappeda kota kendari juga telah terlaksana dengan baik. Hal ini jika ditelisik dari

pelaksanaan pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pasar, sekolah, puskesmas dan peningkatan pembangunan dari sector lingkungan maupun pembangunan non fisik berupa peningkatan moral, akhlak dan disiplin masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan pembinaan mental spiritual masyarakat telah terlaksana dengan baik.

B. Saran-saran

Bertolak dari kesimpulan yang dikemukakan diatas maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penyelesaian suatu pekerjaan secara efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan, pengarah, penyaluran dan pengintegrasian terhadap masyarakat.
2. Kepada seluruh *stakeholders* yang berkaitan terhadap keberhasilan pembangunan daerah agar senantiasa memiliki kesadaran agar berkoordinasi dengan pemerintah kota kendari agar pelaksanaan program pembangunan senantiasa sinkron dengan kebutuhan masyarakat.